

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan di seluruh negara termasuk Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Indonesia telah berlangsung sudah cukup lama. Berbagai persoalan mengenai kemiskinan penduduk dapat dilihat dari aspek sosial, ekonomi, psikologi, dan politik. Kemiskinan berdasarkan aspek sosial dapat dikarenakan terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Pada aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan yang nihil, serta dianggap lemah dalam mengantisipasi peluang. Hal-hal tersebut yang menyebabkan seseorang dapat dikatakan mengalami kemiskinan, salah satunya di Kota Malang.

Perkembangan suatu perkotaan ditandai dengan jumlah penduduk yang mendiami kota tersebut. Perkembangan jumlah penduduk menuntut adanya peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan primer, sekunder, maupun tersier. Di sisi lain terdapat fakta bahwa lebih dari 30% masyarakat miskin tinggal di perkotaan dengan keterbatasan akses. Kota Malang dengan jumlah penduduk sekitar 842.413 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2012) dapat digolongkan sebagai kota besar berdasarkan jumlah penduduk. Tuntutan adanya pelayanan infrastruktur yang memadai diwujudkan dengan pembangunan sarana dan prasarana yang menyediakan kebutuhan masyarakat dari skala kecil, menengah, hingga atas. Isu yang selama ini terjadi adalah dimana terdapat sebuah sarana dan prasarana terutama skala besar, maka di dekat itu banyak bermukim masyarakat miskin. Hal ini didukung dengan data jumlah penduduk miskin di Kota Malang tercatat lebih 5000 KK yang tersebar di seluruh kecamatan (Badan Pusat Statistik, 2012).

Seiring pesatnya pertumbuhan kota, kemiskinan pun secara global berpindah ke kota. Beberapa kondisi yang terjadi akibat kemiskinan antara lain:

1. Penduduk tidak memiliki akses berkelanjutan sehingga tercipta kawasan kumuh;
2. Hampir setiap hari, lokasi perkotaan dipenuhi gelandangan dan pengemis;
3. Terjadi ketimpangan yang tajam antara orang kaya dan orang miskin dalam hal pendidikan dan kesehatan;

4. Terbentuknya permukiman kumuh sebagai akibat penambahan penduduk yang bersumber dari derasnya arus perpindahan penduduk, baik melalui proses urbanisasi dari daerah pedesaan dan sekitarnya maupun melalui proses migrasi.

Hingga tahun 2010 tercatat terdapat puluhan sarana pelayanan publik berupa sarana kesehatan, pendidikan, perbelanjaan dan ruang terbuka yang memberikan daya tarik bagi masyarakat Kota Malang. Hal tersebut berpeluang memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat miskin. Menurut Jung et al (2009), pengeluaran pemerintah untuk membangun fasilitas publik berhubungan dengan upaya mengurangi tingkat kemiskinan di suatu perkotaan. Masyarakat miskin yang ingin memperoleh keuntungan tidak hanya berasal dari kawasan terdekat dengan pelayanan fasilitas publik karena besarnya jumlah pendatang yang bersifat ulang alik. Masyarakat miskin yang bekerja pada pelayanan fasilitas publik bertujuan untuk memperoleh penghidupan secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang tertuang pada pendapatan yang diperoleh. Penghidupan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan merupakan penerimaan manfaat yang tergolong dalam *benefit in kind*.

Selama ini telah banyak kajian mengenai persebaran masyarakat miskin di suatu perkotaan yang dikaitkan dengan pelayanan infrastruktur akan tetapi masih bersifat normatif karena hanya mengkaitkan dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan secara langsung. Apabila dilakukan penelitian lebih lanjut, manfaat pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat dapat diukur melalui tingkat pelayanan berdasarkan masing-masing variabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelayanan infrastruktur terhadap *benefit in kind* yang terdiri dari penerimaan manfaat ekonomi, manfaat pendidikan, dan manfaat kesehatan.

Kota Malang memiliki potensi pelayanan yang besar dengan persebaran sarana prasarana yang lengkap. Penduduk miskin memanfaatkan pelayanan infrastruktur tersebut untuk mencari penghasilan di sektor informal, sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat dari pelayanan infrastruktur dan pengaruh spasial.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah

1. Fenomena masyarakat miskin yang bekerja pada pelayanan infrastruktur tidak memiliki aspek legal, akan tetapi tetap memanfaatkan fasilitas publik tersebut sebagai lahan pekerjaan;

2. Masyarakat miskin yang bekerja pada pelayanan infrastruktur terutama pada sektor informal dan ilegal cenderung saling berdekatan secara lokasi akan tetapi belum dapat menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh; dan
3. Masyarakat miskin yang memperoleh keuntungan dari adanya pelayanan infrastruktur belum terdefinisi secara spasial sehingga ada kemungkinan bahwa pelayanan publik tersebut memberikan keuntungan tanpa adanya pengaruh ketetanggaan secara spasial.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik pelayanan infrastruktur dan *benefit in kind* masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan?
2. Bagaimana model hubungan pelayanan infrastruktur terhadap *benefit in kind* yang diperoleh masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan?

1.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik pelayanan infrastruktur dan *benefit in kind* masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan;
2. Memodelkan hubungan pelayanan infrastruktur terhadap *benefit in kind* yang diperoleh masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

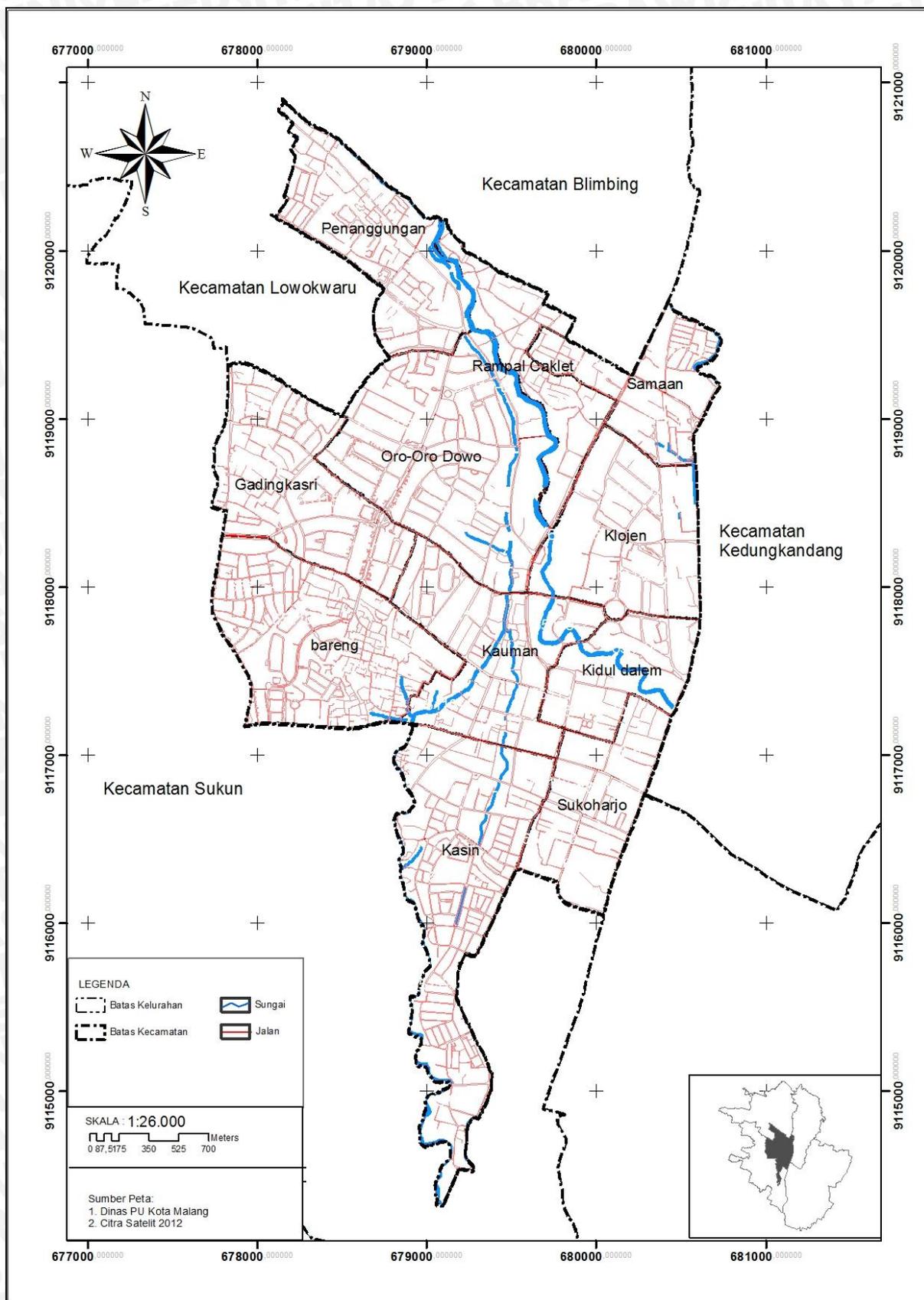
1. Pelayanan infrastruktur merupakan usaha pemenuhan kebutuhan pengguna infrastruktur berupa layanan aksesibilitas, tingkatan sarana, kapasitas sarana, ketersediaan trotoar, perkerasan trotoar, ketersediaan parkir, ketersediaan ruang terbuka, penerangan, keamanan, kunjungan, dan intensitas yang diukur berdasarkan karakteristik fisik dan non fisik. Objek infrastruktur yang dikaji untuk memberikan manfaat adalah sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan ruang terbuka publik;

2. Materi tentang pelayanan infrastruktur berdasarkan variabel aksesibilitas, tingkatan sarana, kapasitas sarana, ketersediaan trotoar, perkerasan trotoar, ketersediaan parkir, ketersediaan ruang terbuka, penerangan, keamanan, kunjungan, dan intensitas;
3. Materi *Benefit in Kind* yang dimaksud adalah manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, dan manfaat ekonomi yang dinyatakan dalam satuan rupiah;
4. Materi mengenai analisis *Spatial Multiple Regresi* yaitu perhitungan statistik secara spasial menggunakan GIS dengan GeoDa;
5. Masyarakat miskin yang diteliti adalah masyarakat miskin yang berkegiatan terkait mata pencaharian di sekitar pelayanan infrastruktur di Kecamatan Klojen tanpa memasukkan unsur bermukim di Kecamatan Klojen; dan
6. Output dari kajian ini adalah permodelan hubungan antara pelayanan infrastruktur dengan *benefit in kind* masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan infrastruktur.

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah yang diambil dalam studi ini adalah Kecamatan Klojen Kota Malang yang meliputi 10 Kelurahan antara lain:

- a. Kelurahan Barend;
- b. Kelurahan Kasin;
- c. Kelurahan Sukoharjo;
- d. Kelurahan Kidul Dalem;
- e. Kelurahan Kauman;
- f. Kelurahan Gadingkasri;
- g. Kelurahan Klojen;
- h. Kelurahan Rampal Celaket;
- i. Kelurahan Samaan;
- j. Kelurahan Oro Oro Dowo; dan
- k. Kelurahan Penanggungan



Gambar 1.1 Peta Wilayah Studi

1.6 Kerangka Pemikiran

Latar Belakang:

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang merupakan prioritas utama dalam pembangunan di perkotaan termasuk Kota Malang yang tercatat memiliki jumlah penduduk miskin lebih dari 5000 KK (BPS, 2012). Akibat dari permasalahan kemiskinan tersebut adalah kurangnya akses yang layak sehingga tercipta permukiman kumuh. Menurut Jung et Al (2009), pengeluaran pemerintah untuk fasilitas publik berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Selama ini hubungan tersebut hanya dipandang berdasarkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara langsung tanpa melihat manfaat tidak langsung yang dapat dikonversi ke nilai rupiah. Tingkat pelayanan infrastruktur dan manfaat yang diterima masyarakat miskin dapat dipertakan secara spasial

Identifikasi Masalah:

1. Fenomena masyarakat miskin yang bekerja pada pelayanan infrastruktur tidak memiliki aspek legal, akan tetapi tetap memanfaatkan fasilitas publik tersebut sebagai lahan pekerjaan;
2. Masyarakat miskin yang bekerja pada pelayanan infrastruktur terutama pada sektor informal dan *illegal* cenderung saling berdekatan secara lokasi akan tetapi belum dapat menentukan jumlah pendapatan yang diperoleh; dan
3. Masyarakat miskin yang memperoleh keuntungan dari adanya pelayanan infrastruktur belum terdefinisi secara spasial sehingga ada kemungkinan bahwa pelayanan publik tersebut memberikan keuntungan tanpa adanya pengaruh ketetanggaan secara spasial.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana karakteristik pelayanan infrastruktur dan *benefit in kind* yang diperoleh masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan?
2. Bagaimana model hubungan pelayanan infrastruktur terhadap *benefit in kind* yang diperoleh masyarakat miskin yang berkegiatan di sekitar pelayanan?

Ruang Lingkup Materi

1. Infrastruktur yang dikaji adalah sarana perdagangan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, dan ruang terbuka publik;
2. Materi tentang pelayanan infrastruktur berdasarkan variabel aksesibilitas, tingkatan, kapasitas sarana, ketersediaan trotoar, perkerasan trotoar, ketersediaan parkir, ketersediaan ruang terbuka, penerangan, keamanan, kunjungan, dan intensitas Materi *Benefit in Kind* adalah manfaat kesehatan, manfaat pendidikan, dan manfaat ekonomi yang dinayatakan dalam satuan rupiah;
3. Materi mengenai analisis *Spatial Multiple Regresi* dengan GeoDa.
4. Masyarakat miskin adalah yang berkegiatan terkait mata pencaharian di sekitar pelayanan infrastruktur di Kecamatan Klojen tanpa memasukkan unsur bermukim di Kecamatan Klojen;
5. Output dari kajian ini adalah permodelan hubungan antara tingkat pelayanan infrastruktur dengan *benefit in kind* masyarakat miskin yang berkegiatan.

Model hubungan pelayanan infrastruktur terhadap *Benefit in Kind* masyarakat miskin

Gambar 1.2 Kerangka pemikiran

1.7 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademisi, pemerintah dan masyarakat.

a. Pihak akademisi

Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber keilmuan dan pengetahuan di bidang kemiskinan dan infrastruktur. Keilmuan tersebut adalah pendekatan kajian kemiskinan berdasarkan pengaruh secara spasial. Dengan demikian, pengetahuan dan keilmuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Pihak pemerintah

Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam penentuan kebijakan langsung maupun tidak langsung terkait fenomena persebaran masyarakat miskin yang memanfaatkan pelayanan infrastruktur sebagai tempat memperoleh manfaat. Bagi pemerintah akan dapat memberi pertimbangan untuk menyikapi fenomena tersebut.

c. Masyarakat

Bagi masyarakat, penelitian ini secara tidak langsung dapat memberikan masukan bagi pemanfaatan infrastruktur yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sendiri atau menjadi lahan bagi penerimaan manfaat masyarakat miskin yang memberikan fenomena beraktivitas secara ilegal pada kawasan pelayanan infrastruktur.

1.8 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian “Permodelan Hubungan Pelayanan Infrastruktur terhadap *Benefit in Kind* Masyarakat Miskin” terdiri dari

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang dari penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup materi, ruang lingkup wilayah, kerangka pemikiran, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan teoritis mengenai kemiskinan, karakteristik pelayanan infrastruktur, tinjauan analisis *multiple spatial regression*, dan pemaparan studi-studi terdahulu.

Bab III : Metodologi Penelitian

Berisi prosedur yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, definisi operasional konsep dan variabel, metode pengumpulan data, metode sampling, metode analisis data, dan kerangka analisis.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Berisi data-data hasil survey serta pembahasan materi berdasarkan analisa yang dilakukan baik menggunakan analisis deskriptif dan evaluatif.

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan dari penelitian Permodelan Hubungan Pelayanan Infrastruktur dengan *Benefit in Kind* Masyarakat Miskin untuk menjawab rumusan masalah, serta saran yang diajukan oleh peneliti.

